

ABSTRAK

Maraknya peredaran minuman keras di Pati tentu saja menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pati membuat aturan tentang hiburan karaoke dan minuman keras Perda Nomor 22 tahun 2002 tentang minuman keras yang terdiri dari 13 pasal. Tujuan dari Perda tersebut yaitu untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, penimbun, penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan, memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung jawab.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode pendekatan *sosio legal research* dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi lapangan dengan cara wawancara, studi dokumentasi bersumber dari perda terkait, putusan pengadilan yang membutuhkan perizinan pihak terkait dalam memperolehnya, serta studi pustaka bersumber pada buku-buku, kamus, jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pati dengan cara wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati.

Kendala-kendala dalam penegakan hukum minum-minuman keras berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran minum-minuman keras, penertiban atau razia yang dilakukan oleh Satpol PP masih terbang pilih, serta penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum minum-minuman keras dengan tiga cara yaitu: Pre-emptif atau upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk memberikan pengertian pada masyarakat yang melibatkan instansi-instansi terkait, Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat kemudian melakukan razia-razia di daerah yang rawan dengan peredaran minuman keras, Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman keras berupa proses penyidikan terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002.

Kata Kunci: peraturan daerah, minuman keras, tindak pidana

ABSTRACT

The widespread distribution of liquor in Pati has certainly caused unrest for most of the community, therefore the Pati Regency Government has made a regulation on karaoke entertainment and liquor Perda No. 22 of 2002 on liquor which consists of 13 articles. The purpose of the Perda is to provide a legal basis for taking action against dealers, hoarders, sellers, users of liquor, and to regulate, supervise, control, provide legal certainty and protection for the community to overcome the negative consequences of irresponsible use of alcohol.

The approach method used by the author is sociological juridical. This study uses a research specification in the form of analytical descriptive research. This type of research used by the author is normative juridical and socio-legal research approach method with qualitative methods. The data collection technique used by the author is by means of field studies by means of interviews, documentation studies sourced from related regional regulations, court decisions that require the permission of related parties to obtain them, and literature studies sourced from books, dictionaries, journals and others. In this study, the authors used qualitative data analysis with an interactive analysis model. The author conducted research at the Pati District Court by interviewing one of the judges at the Pati District Court.

Constraints in enforcing the drinking-liquor law stem from a lack of public awareness of the dangers of alcohol, lack of supervision of the circulation of alcohol, policing or raids carried out by Satpol PP are still selective, and the application of sanctions for offenders who are too light so that it does not provide a deterrent effect. Efforts to overcome the obstacles to law enforcement in drinking alcohol in three ways, namely: Pre-emptive or early prevention through educational activities to provide understanding to the community involving related agencies, Preventive is a follow-up to pre-emptive efforts which are still at the level of prevention before the occurrence of crime by following up on reports from the public then carrying out raids in areas prone to the circulation of alcohol, Repressive is the action and law enforcement against alcoholic violations in the form of pr Investigation proceedings against adulterated alcoholic drink violations based on the Criminal Procedure Law (Criminal Procedure Code) and Pati District Regulation Number 22 Year 2002.

Keywords: local regulations, liquor, criminal acts